



RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cenderawasih No. 233 B Makassar (90222)
Telp. (0411) 870708 – 877021 Fax. (0411) 876223

Tahun 2021



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang,

Hendaknya Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renja ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018 - 2023 yang akan menjadi pedoman Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022

Makassar, Maret 2021

KEPALA BADAN,

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19671203 199403 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	7
TABEL T-C 29	9
2.2. ANALISIS PELAYANAN SKPD	18
TABEL T-C 30	21
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	35
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	37
TABEL T-C 31	39
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	49
TABEL T-C 32	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
4.1 RENCANA KERJA	62
TABEL T-C 33	63
TABEL T-B 56	76

BAB V	PENUTUP	
5.1.	KAJIAN PELAKSANAAN	89
5.2	PENUTUP	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, merupakan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Prov. Sul Sel Tahun Periode 2018-2023 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sul Sel pada Tahun 2021.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa meningkatkan pelayanan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global. Begitupula keberadaan SDM Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemampuan yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan dunia yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya utamanya tuntutan kinerja pelayanan publik yang belum memadai. Menghadapi keadaan yang demikian, maka kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan

pemerintah daerah menjadi sangat relevan, utamanya penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menyediakan layanan publik yang mandiri dan profesional.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah disusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2018-2023 disusun dengan memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, program, serta kegiatan yang merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan dalam bentuk Program yang pelaksanaannya lebih dipertajam secara terukur dan terurai pada kegiatan-kegiatan, penjabaran program kerja organisasi dalam lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2018-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022. Rencana Kerja (RENJA) ini menguraikan lebih rinci tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA.

Secara umum Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 memuat kebijakan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mewujudkan organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disase 2019 lingkup pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 249)
15. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

16. Peraturan Gubernur nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57/I/Tahun 2020 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020
19. Perka LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator
20. Perka LAN No. 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
21. Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 483/K.I./PDP.09 Tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel telah terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja tahunan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2022.

Adapun tujuan penyusunan program tahunan tersebut antara lain :

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Tersedianya tolak ukur rencana kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsi-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Terwujudnya komitmen bersama diantara Stakeholder terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Perubahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Urusan Pengembangan SDM, serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijaksanaan yang akan ditempuh, menggunakan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dari kebijaksanaan yang akan ditempuh. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dan menentukan untuk penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun Periode 2018 - 2023. Penyusunan Evaluasi Program kegiatan telah dilaksanakan sesuai jumlah alokasi anggaran dalam APBD Prov. Sul Sel T.A. 2020 keadaan 31 Desember 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD sebesar **Rp. 35.958.659.956,-** untuk pelaksanaan Lima (7) program dengan 36 kegiatan. Realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember

2020 sebesar **Rp. 34.569.593.386,-** atau **96,14%** dan Fisik **100%**. Setelah dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka diperoleh capaian kinerja outcome kegiatan sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Gambaran Evaluasi penggunaan anggaran belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Capaian Kinerja input, output dan outcome pada TA. 2019-2021 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel
Realisasi Capaian Kinerja Input (dana),
Output (Keluaran/Fisik) dan Outcome (Hasil)
Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Capaian (%)			Ket.
	Input (dana)	Output (keluaran / fisik)	Outcome (Hasil)	
2019	100	100	96.14	
2020	100	0	0	
2021	100	0	0	

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2021	PERKIRAAN RELAISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RELAISASI TARGET RENSTRA %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100	100	100	100	100	100 %		

	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	100	100	100	100	100	100 %		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	100	100	100	100	100	30 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	100	100	100	100	100	55 Orang		
		Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	100	100	100	100	100	159 Orang	240	29,3

	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	100	100	100	100	100	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	800	90,9
		Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	100	100	100	100	100	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	24	100
	5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	100	100	100	100	100 %	120	40

	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama PengembanganKompetensi Pimpinan Daerah Jabatan PimpinanTinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertajabatan Fungsional	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)	100	100	100	100	100	30 Orang	30	100
	Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daearah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	100	100	100	100	100	3 Dokumen	170	40
		Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)	100	100	100	100	100		25 Orang	30

	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	100	100	100	100	100	6 MOU/PKS	125	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	100	100	100	100	100		25	0
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	100	100	100	100	100	30 Orang	24	100
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)	100	100	100	100	100	180 Orang	50	40

		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)	100	100	100	100	100	100 Orang	24	100
	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen, kepemimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	100	100	100	100	100	24 Kab/Kota instansi pembina		
	Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan		100	100	100	100	100		3	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100	100	100	100	100	0.2 %	24	60

		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	98 %	24	0
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100	100	100	100	100	98 %	24	16
	X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100 %	24	12
	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	100	100	100	100	100	50 Orang	24	9,6
		Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	100	100	100	100	100	2 Dokumen		

		Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	100	100	100	100	100	4 Dokumen	10	100
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	100	100	100	100	100	1 Dokumen	24	100
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	100	100	100	100	100	1 Dokumen	24	0
	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	100	100	100	100	100	1 Dokumen	24	19,2

	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	100	100	100	100	100	1 Dokumen	24	96
	XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	100	100	100	100	100	10 Laporan		
	X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100 %	12	100

	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	100	100	100	100	100	134 Orang	13	100
	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	100	100	100	100	100	1 Dokumen	13	100
	XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	100	100	100	100	100	12 laporan	24	7,1

	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	100	100	100	100	100	² Laporan	24	16
	XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	100	100	100	100	100	² Laporan	24	96
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	100	100	100	100	100	³ Laporan	24	12

	XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	100	100	100	100	100	4 Laporan	24	9,6
	X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100 %		
	XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	100	100	100	100	100	185 Pasang	24	11,7
	XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya (Orang)	100	100	100	100	100	134 Orang	24	36,9

	X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			100	100	100	100	100	100 %	24	6,3
	XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)	100	100	100	100	100	5 Unit		
	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	100	100	100	100	100	80 Unit	24	9,6
	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	100	100	100	100	100	30 Jenis	20	100

	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	100	100	100	100	100	40 Jenis	10	100
	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	100	100	100	100	100	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	10	100
	X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100 %	20	100
	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	100	100	100	100	100	45 Orang	24	48

	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	100	100	100	100	100	1 Tahun	24	40
	X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100 %	24	40
	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	100	100	100	100	100	13 Unit	10	100
	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	100	100	100	100	100	7 Unit	20	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)	100	100	100	100	100	6 Unit		

	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)	100	100	100	100	100	3 Aplikasi	20	3,3
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)	100	100	100	100	100	40 Unit	20	100
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	100	100	100	100	100	140 Unit		

2.2. ANALISIS PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023, maka telah ditetapkan tujuh program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari Rancangan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yakni misi pembangunan daerah ke-1 :

1. Misi 1 : **Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**
 2. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan
 3. Sasaran 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- dimana sasarannya antara lain adalah ” Meningkatkan derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat”.

Berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, dan/atau sumber dana lainnya yang sah. maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA (PRIORITAS)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa rumpun diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Pelatihan Kepemimpinan. Adapun rumpun dan jenis diklat dalam program ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 2 Sub. Kegiatan;

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 5 Sub. Kegiatan;

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar.
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen Pelatihan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (*training delivery*) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (*training development*). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (*training need analisis*) dalam rangka peningkatankompetensisumberdaya manusia yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi Jabatan ASN dan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakatlainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program Pelatihan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan system pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program Pelatihan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi Pelatihan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Penyusunan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini mengacu pada pertimbangan pada saat ini tercatat sekitar 450-an lembaga diklat baik yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (SIDA LAN RI, 2013). Dengan begitu banyaknya lembaga diklat aparatur, salah satu agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah penataan kelembagaan diklat daerah yang diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) lembaga diklat.

Penataan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki totalitas sistem organisasi diklat yang terdiri dari aspek-aspek kelembagaan diklat yang statis (struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan), dan aspek ketatalaksanaan dan proses yang dinamis seperti pedoman kerja, tata hubungan kerja, dan koordinasi di dalam dan dengan organisasi luar.

Penataan kelembagaan diklat ini perlu dilakukan mengingat fungsi penyelenggaraan diklat itu sangat terkait erat dengan berbagai stakeholders seperti bagian kepegawaian, instansi pengirim/dinas dan badan terkait. Disamping itu penataan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong lembaga diklat agar lebih berfokus pada upaya inovasi program dan metode pelaksanaan diklat yang efektif dalam peningkatan kompetensi aparatur. Dalam praktek kediklatan, kita masih menjumpai beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan kelembagaan diklat.

Diperlukan penataan koordinasi yang lebih erat antara bidang diklat dengan bidang kepegawaian terutama menyangkut rekrutmen dan seleksi calon peserta diklat, dan penempatan serta pemberdayaan alumni atau lulusan diklat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dari beberapa fenomena tersebut, maka diperlukan rumusan strategi penataan kelembagaan diklat daerah agar benar-benar mampu menjadi pendukung peningkatan kompetensi aparatur di daerah dan juga dalam rangka meningkatkan jejaring kediklatan maka diperlukan beberapa strategi dalam membangun Kemitraan dan Jejaring.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang dan keuangan, penyediaan sistem informasi manajemen Pelatihan, kepegawaian dan keuangan, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta pengelolaan multi media pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusia yang terakreditasi, sehingga dapat diwujudkan

profesionalisme dan kemandirian Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Pelatihan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini adalah:

- (1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (5) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelatihan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusiaterakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola Pelatihan yang profesional dan mandiri, untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan melalui Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Penyusunan Laporan Tahunan Pelatihan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan Disiplin, Motivasi Kerja serta peningkatan Kualitas dan Kompetensi seluruh Sumber Daya Aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang menuntut adanya ketersediaan administrasi kepegawaian aparat OPD serta ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian.

2.3 KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV.SUL-SEL

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 memuat 2 program 7 Kegiatan dan 34 Sub. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dengan rincian pendanaan selang 3 Tahun sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Prioritas terdiri dari 2 Kegiatan 7 Sub. Kegiatan;
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 2 Sub. Kegiatan;

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 5 Sub. Kegiatan;
- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.
 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar.
 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

2.4 INDIKATOR KINERJA

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 terdapat 2 Program dengan indikator kinerja (Outcome) sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA (PRIORITAS)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern, dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Cakupan SDM Aparatur yang Lulus diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Managerial; Cakupan Ketersediaan Pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan; Cakupan Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar ISO.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah % Pemenuhan administrasi perkantoran,% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran,% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu, % ASN berkinerja sangat baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (TC 30)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan (Jenis)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara (Unit)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai pencapaian kinerja dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel hingga tahun 2020, dimana terdapat 6 program dan 36 kegiatan, dengan presentase realisasi anggaran rata-rata sebesar 92,41 % dengan predikat “baik” dan relisasi fisik sebesar 100 % dengan predikat “sangat baik”. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel telah mampu melaksanakan tupoksinya yang melekat pada program dan kegiatan tersebut.

Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan dan peningkatan, dalam upaya mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Beberapa permasalahan yang ada maupun yang berpotensi muncul di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan Aparatur Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan aparatur belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program Pelatihan.
- b. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responsif terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan aparatur pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai

pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.

- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Pelatihan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan Pelatihan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupaya untuk mengembangkan kompetensi, sebagai upaya mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Dalam Negeri agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk membangun profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam Negeri maka diperlukan perencanaan relokasi baru gedung kampus berlokasi diluar kota makassar yang lebih modern dengan luas area yang cukup memenuhi syarat sebagai tempat pelatihan. Rencana relokasi baru gedung tersebut mudah-mudahan dapat terealisasi
- e. Secara umum alokasi anggaran masih kurang di beberapa kegiatan prioritas objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya.

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan dan langkah strategis yang tentunya berpedoman pada fungsi dan wewenang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel, dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi.

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan publik
2. Peningkatan daya saing
3. Reformasi Pelatihan
4. Diklat berbasis kompetensi.
5. Learning Organization atau organisasi pembelajaran

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, program kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel, baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target indikator kinerja, serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 1 Program, yang terdiri atas 2 kegiatan
- Pagu Indikatif/kebutuhan dana sebesar **Rp. 5.553.028632,-** diluar anggaran rutin

Telah dilakukan review pada hari Kamis Tanggal 10 Mei 2021 telah dilaksanakan pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta sub kegiatan

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 Tabel T-C 31
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel

NO	RANCANGAN AWAL					ANALISA KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	KEBUTUHAN DANA	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	8	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MAKASSAR	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	5%	5.553.028.632,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MAKASSAR	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	5%	6.330.130.000,00	
	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	MAKASSAR	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	5%	1.534.640.632,00	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	MAKASSAR	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	5%	1.803.496.000,00	

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	5%	831.276.950,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	5%	983.269.000,00	
	MAKASSAR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	5%			MAKASSAR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	5%		
	MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	5%			MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	5%		
	MAKASSAR	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%	703.363.682,00		MAKASSAR	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%	820.227.000,00	

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%		
5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	MAKASSAR	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5%	4.018.388.000,00	5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	MAKASSAR	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5%	4.526.634.000,00	

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertajabatan Fungsional	MAKASS AR	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)	5%	488.890.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertajabatan Fungsional	MAKASS AR	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)	5%	558.890.000,00	
Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	MAKASS AR	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	5%	1.251.274.000,00	Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	MAKASS AR	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	5%	1.543.277.000,00	

	MAKASS AR	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)	5%			MAKASS AR	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)	5%		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	MAKASS AR	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	5%	182.725.000,00	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	MAKASS AR	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	5%	202.725.000,00	
	MAKASS AR	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	5%			MAKASS AR	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	5%		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	5%	1.440.419.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	5%	1.516.662.000,00	
	MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)	5%			MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)	5%		

		MAKASS AR	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)	5%			MAKASS AR	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)	5%		
Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang KompetensiPengelo laan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan		MAKASS AR	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpina n dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	5%	655.080.000,0 0	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang KompetensiPengel olaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	MAKASS AR	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepe mimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	5%	705.080.000,0 0	
		MAKASS AR					MAKASS AR				

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	MAKASS AR	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	5%	33.437.964.292,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	MAKASS AR	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	5%	34.910.382.732,00	
	MAKASS AR	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	5%			MAKASS AR	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	5%		
	MAKASS AR	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	5%			MAKASS AR	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	5%		
X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5%	899.920.000,0 0	X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5%	1.079.784.000, 00	
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	5%	616.704.000,0 0	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	5%	753.670.000,0 0	

	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	5%			MAKASS AR	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	5%		
	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	5%			MAKASS AR	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	5%		
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	5%	45.145.000,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	5%	50.145.000,00	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	5%	15.169.000,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	5%	22.169.000,00	
XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	5%	80.002.000,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	5%	87.000.000,00	

XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	5%	16.416.000,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	5%	20.316.000,00	
XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	5%	126.484.000,00	XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	5%	146.484.000,00	
X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5%	24.646.710.424,00	X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5%	25.687.145.124,00	
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAKASS AR	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	5%	24.000.000.000,00	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAKASS AR	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	5%	25.001.400.000,00	
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	MAKASS AR	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	5%	480.462.724,00	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	MAKASS AR	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	5%	500.462.724,00	

XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	MAKASSAR	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	5%	30.873.100,00	XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	MAKASSAR	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	5%	34.873.100,00	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAKASSAR	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	5%	52.782.000,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAKASSAR	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	5%	55.700.000,00	
XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MAKASSAR	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	5%	30.693.000,00	XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MAKASSAR	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	5%	35.000.000,00	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	MAKASSAR	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	5%	36.550.300,00	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	MAKASSAR	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	5%	40.820.300,00	

XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MAKASS AR	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	5%	15.349.300,00	XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MAKASS AR	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	5%	18.889.000,00	
X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5%	706.346.260,00	X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5%	724.345.000,00	
XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MAKASS AR	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	5%	145.850.000,00	XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MAKASS AR	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	5%	158.850.000,00	
XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	MAKASS AR	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya (Orang)	5%	560.496.260,00	XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	MAKASS AR	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya (Orang)	5%	565.495.000,00	
X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	5%	2.968.659.640,00	X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	5%	3.057.761.640,00	

XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	MAKASS AR	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)	5%	58.645.000,00	XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	MAKASS AR	Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor (Unit)	5%	60.000.000,00	
XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAKASS AR	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	5%	2.449.253.000, 00	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAKASS AR	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	5%	2.500.000.000, 00	
XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MAKASS AR	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	5%	44.353.000,00	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MAKASS AR	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	5%	54.353.000,00	
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	MAKASS AR	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	5%	185.104.640,0 0	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	MAKASS AR	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	5%	193.104.640,0 0	

XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAKASS AR	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%	231.304.000,0 0	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAKASS AR	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	5%	250.304.000,0 0	
X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5%	2.269.221.168,00	X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5%	2.349.230.168,00	
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	MAKASS AR	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	5%	1.501.620.000,00	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	MAKASS AR	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	5%	1.581.629.000,00	
XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAKASS AR	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	5%	767.601.168,00	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAKASS AR	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	5%	767.601.168,00	

X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5%	1.947.106.800,00	X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5%	2.012.116.800,00	
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASS AR	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	5%	400.760.000,00	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASS AR	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	5%	450.760.000,00	
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAKASS AR	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	5%	150.390.000,00	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAKASS AR	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	5%	180.390.000,00	
	MAKASS AR	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)	5%			MAKASS AR	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)	5%		

	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAKASS AR	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)	5%	95.000.000,00	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAKASS AR	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)	5%	0,00	
	XXX Pemeliharaan Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MAKASS AR	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)	5%	884.270.000,0 0	XXX Pemeliharaan Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MAKASS AR	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)	5%	894.280.000,0 0	
	XXX Pemeliharaan Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MAKASS AR	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	5%	416.686.800,0 0	XXX Pemeliharaan Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MAKASS AR	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	5%	486.686.800,0 0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD lain Kab/Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C 32
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

NO	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MAKASSAR	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100 %	
	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	MAKASSAR	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	30 Orang	
		MAKASSAR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	55 Orang	
		MAKASSAR	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	159 Orang	
	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	MAKASSAR	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se Sulsel instansi pembina)	24 Kab/Kota se Sulsel instansi pembina	
	5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	MAKASSAR	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se Sulsel instansi pembina)	24 Kab/Kota se Sulsel instansi pembina	

	MAKASS AR	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Serta jabatan Fungsional Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	MAKASS AR MAKASS AR	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang) Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	30 Orang 3 Dokumen	
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	MAKASS AR MAKASS AR	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang) Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	25 Orang 6 MOU/PKS	
	MAKASS AR	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	55 Orang	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	30 Orang	
	MAKASS AR	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)	180 Orang	
Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga	MAKASS AR	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)	100 Orang	

Pengembang KompetensiPengelolaan Sumber Belajar dan	MAKASS AR	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	24 Kab/Kota instansi pembina	
Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	MAKASS AR			
	MAKASS AR	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.2 %	
	MAKASS AR	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98 %	
	MAKASS AR	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	98 %	
X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	50 Orang	
	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	4 Dokumen	

RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	1 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	1 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	MAKASS AR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASS AR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	
	MAKASS AR	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	10 Laporan	
X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAKASS AR	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	134 Orang	
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	MAKASS AR	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	1 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	MAKASS AR	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	12 laporan	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAKASS AR	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	2 Laporan	
XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MAKASS AR	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	2 Laporan	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	MAKASS AR	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	3 Laporan	

XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MAKASS AR	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	4 Laporan	
X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	
XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MAKASS AR	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	185 Pasang	
XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	MAKASS AR	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya (Orang)	134 Orang	
X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	MAKASS AR	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	MAKASS AR	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)	5 Unit	
XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAKASS AR	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	80 Unit	
XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MAKASS AR	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	30 Jenis	
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	MAKASS AR	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	40 Jenis	
XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAKASS AR	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	
X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	MAKASS AR	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	45 Orang	

	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAKASS AR	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	1 Tahun	
	X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAKASS AR	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit) Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	13 Unit 7 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa *"Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat"*, telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunannya. Kemudian pasal 23 ayat (4) pada peraturan ini, juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa *"RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."*

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan Pengembangan sumber daya manusia berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai kegiatan utama pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pembangunan daerah. Selanjutnya pada sisi lain, kedudukan dan peran lembaga Pelatihan perlu semakin diperkuat dan ditingkatkan sejalan dengan nuansa, semangat dan filosofi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Perda ini memposisikan Badan Pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan membantu Gubernur dalam merumuskan, memfasilitasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan SDM aparatur dilingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se Sulawesi Selatan, sehingga Gubernur dalam menjalankan kewenangannya, baik kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam bidang pengembangan SDM aparatur dengan sendirinya menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan sumber daya manusia menetapkan 4 (empat) kebijakan yaitu :

- 1) Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat
- 2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Pelatihan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama Pelatihan

- 4) Pengembangan kualitas Widyaswara dan penyelenggara untuk memenuhi regulasi Pelatihan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Renja

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (IT)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Melaksanakan Pelatihan sesuai dengan regulasi Pelatihan.

b. Sasaran Renja

Dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan maka ditentukan sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya program diklat berbasis kompetensi
2. Meningkatnya kapasitas profesionalitas Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder
4. Tetwujudnya diklat sesuai regulasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pada RPKD tahun 2022, Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel telah merencanakan pelaksanaan 2 Program dan 7 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.053.179.241,00,-. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel. Selanjutnya untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indicator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indicator kinerja serta pendanaan indikatif untuk perubahan anggaran tahun 2022, yang dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 :

Tabel T-C 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV. SULSEL**

NO	Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencan Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencan Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Makas sar	100 %	5.553.028.632,00	APBD		100 %	6.330.130.000,00
	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	Makas sar	100 %	1.534.640.632,00	APBD		100 %	1.803.496.000,00

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	Makassar	30 Orang	831.276.950,00	APBD		30 Orang	983.269.000,00
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	Makassar	55 Orang		APBD		55 Orang	
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	Makassar	159 Orang		APBD		159 Orang	
	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Makassar	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	703.363.682,00	APBD		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	820.227.000,00

Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	Makas sar	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina		APBD		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	
5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Makas sar	100 %	4.018.388.000,00	APBD		100 %	4.526.634.000,00
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertajabatan Fungsional	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)	Makas sar	30 Orang	488.890.000,00	APBD		30 Orang	558.890.000,00
Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	Makas sar	3 Dokumen	1.251.274.000,00	APBD		3 Dokumen	1.543.277.000,00

	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)	Makassar	25 Orang		APBD	25 Orang	
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	Makassar	6 MOU/PKS	182.725.000,00	APBD	6 MOU/PKS	202.725.000,00
	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	Makassar	55 Orang		APBD	55 Orang	

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	Makas sar	30 Orang	1.440.419.000,00	APBD		30 Orang	1.516.662.000,00
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)							
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)							
	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang KompetensiPengelolaan Sumber Belajar dan	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	Makas sar	24 Kab/Kota instansi pembina	655.080.000,00	APBD		24 Kab/Kota instansi pembina	705.080.000,00

	Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan		Makassar			APBD		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	Makassar	0.1 %		APBD	0 %	34.910.382.732,00
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Makassar	98 %	33.437.964.292,00	APBD	100 %	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Makassar	98 %		APBD	100 %	

X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makas sar	100 %	899.920.000,00	APBD		100 %	1.079.784.000,00
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	Makas sar	50 Orang	616.704.000,00	APBD		50 Orang	753.670.000,00
	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Makas sar	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	Makas sar	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	Makas sar	1 Dokumen	45.145.000,00	APBD		1 Dokumen	50.145.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	Makas sar	1 Dokumen	15.169.000,00	APBD		1 Dokumen	22.169.000,00

XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Makas sar	1 Dokumen	80.002.000,00	APBD		1 Dokumen	87.000.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Makas sar	1 Dokumen	16.416.000,00	APBD		1 Dokumen	20.316.000,00
XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	Makas sar	10 Laporan	126.484.000,00	APBD		10 Laporan	146.484.000,00
X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makas sar	100 %	24.646.710.424,00	APBD		100 %	25.687.145.124,00
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	Makas sar	134 Orang	24.000.000.000,00	APBD		134 Orang	25.001.400.000,00
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	Makas sar	1 Dokumen	480.462.724,00	APBD		1 Dokumen	500.462.724,00

XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	Makas sar	12 laporan	30.873.100,00	APBD		12 laporan	34.873.100,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	Makas sar	2 Laporan	52.782.000,00	APBD		2 Laporan	55.700.000,00
XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	Makas sar	2 Laporan	30.693.000,00	APBD		2 Laporan	35.000.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	Makas sar	3 Laporan	36.550.300,00	APBD		3 Laporan	40.820.300,00
XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	Makas sar	4 Laporan	15.349.300,00	APBD		4 Laporan	18.889.000,00

	X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makas sar	100 %	706.346.260,00	APBD		100 %	724.345.000,00
	XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	Makas sar	185 Pasang	145.850.000,00	APBD		185 Pasang	158.850.000,00
	XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya (Orang)	Makas sar	134 Orang	560.496.260,00	APBD		134 Orang	565.495.000,00
	X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makas sar	100 %	2.968.659.640,0 0	APBD		100 %	3.057.761.640,0 0
	XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)	Makas sar	5 Unit	58.645.000,00	APBD		5 Unit	60.000.000,00

XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	Makas sar	80 Unit	2.449.253.000,00	APBD		80 Unit	2.500.000.000,00
XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetak dan penggandaan (Jenis)	Makas sar	30 Jenis	44.353.000,00	APBD		30 Jenis	54.353.000,00
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	Makas sar	40 Jenis	185.104.640,00	APBD		40 Jenis	193.104.640,00
XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	Makas sar	24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	231.304.000,00	APBD		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	250.304.000,00
X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makas sar	100 %	2.269.221.168,00	APBD		100 %	2.349.230.168,00
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	Makas sar	45 Orang	1.501.620.000,00	APBD		45 Orang	1.581.629.000,00

XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	Makas sar	1 Tahun	767.601.168,00	APBD	1 Tahun	767.601.168,00
X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makas sar	100 %	1.947.106.800,00	APBD	100 %	2.012.116.800,00
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	Makas sar	13 Unit	400.760.000,00	APBD	13 Unit	450.760.000,00
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	Makas sar	7 Unit	150.390.000,00	APBD	7 Unit	180.390.000,00
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)	Makas sar	6 Unit		APBD	6 Unit	

	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)	Makas sar	3 Aplikasi	95.000.000,00	APBD		9 Aplikasi	0,00
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)	Makas sar	40 Unit	884.270.000,00	APBD		40 Unit	894.280.000,00
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Makas sar	140 Unit	416.686.800,00	APBD		140 Unit	486.686.800,00

Tabel T-B 56

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

NO	Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	RENCANA 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	makassar	5%	5.553.028.632,00		100 %	6.330.130.000,00
	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis	makassar	5%	1.534.640.632,00		100 %	1.803.496.000,00

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental (Orang)	makassar	5%	831.276.950,00		30 Orang	983.269.000,00
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang)	makassar	5%			55 Orang	
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis (Orang)	makassar	5%			159 Orang	
Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	makassar	5%	703.363.682,00		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	820.227.000,00

Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelatihan yang telah dimonev terkait Penyelenggaraan pelatihan tingkat prov. dan Kab./Kota (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	makassar	5%			24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	
5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	makassar	5%	4.018.388.000,00		100 %	4.526.634.000,00
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Serta jabatan Fungsional	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel (Orang)	makassar	5%	488.890.000,00		30 Orang	558.890.000,00
Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan (Dokumen)	makassar	5%	1.251.274.000,00		3 Dokumen	1.543.277.000,00

	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University (Orang)	makassar	5%			25 Orang	
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah (MOU/PKS)	makassar	5%	182.725.000,00		6 MOU/PKS	202.725.000,00
	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama (Orang)	makassar	5%			55 Orang	

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Orang)	makassar	5%	1.440.419.000,00		30 Orang	1.516.662.000,00
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar (Orang)	makassar	5%			180 Orang	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional (Orang)	makassar	5%			100 Orang	
Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen, kepemimpinan dan latsar (Kab/Kota instansi pembina)	makassar	5%	655.080.000,00		24 Kab/Kota instansi pembina	705.080.000,00

Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan		makassar					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	makassar	5%	33.437.964.292,00		0 %	34.910.382.732,00
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	makassar	5%			100 %	
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	makassar	5%			100 %	

X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	makassar	5%	899.920.000,00		100 %	1.079.784.000,00
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah (Orang)	makassar	5%	616.704.000,00		50 Orang	753.670.000,00
	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	makassar	5%			2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	makassar	5%			4 Dokumen	
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	makassar	5%	45.145.000,00		1 Dokumen	50.145.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia (Dokumen)	makassar	5%	15.169.000,00		1 Dokumen	22.169.000,00

XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	makassar	5%	80.002.000,00		1 Dokumen	87.000.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	makassar	5%	16.416.000,00		1 Dokumen	20.316.000,00
XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi (Laporan)	makassar	5%	126.484.000,00		10 Laporan	146.484.000,00
X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	makassar	5%	24.646.710.424,00		100 %	25.687.145.124,00
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (Orang)	makassar	5%	24.000.000.000,00		134 Orang	25.001.400.000,00
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dokumen)	makassar	5%	480.462.724,00		1 Dokumen	500.462.724,00

XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi keuangan SKPD (laporan)	makassar	5%	30.873.100,00		12 laporan	34.873.100,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Laporan)	makassar	5%	52.782.000,00		2 Laporan	55.700.000,00
XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun (Laporan)	makassar	5%	30.693.000,00		2 Laporan	35.000.000,00
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	makassar	5%	36.550.300,00		3 Laporan	40.820.300,00
XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	makassar	5%	15.349.300,00		4 Laporan	18.889.000,00

X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	makassar	5%	706.346.260,00		100 %	724.345.000,00
XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia (Pasang)	makassar	5%	145.850.000,00		185 Pasang	158.850.000,00
XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya (Orang)	makassar	5%	560.496.260,00		134 Orang	565.495.000,00
X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	makassar	5%	2.968.659.640,0 0		100 %	3.057.761.640,0 0
XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Unit)	makassar	5%	58.645.000,00		5 Unit	60.000.000,00

XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	makassar	5%	2.449.253.000,0 0		80 Unit	2.500.000.000,0 0
XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetak dan penggandaan (Jenis)	makassar	5%	44.353.000,00		30 Jenis	54.353.000,00
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	makassar	5%	185.104.640,00		40 Jenis	193.104.640,00
XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina) (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	makassar	5%	231.304.000,00		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	250.304.000,00
X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	makassar	5%	2.269.221.168,0 0		100 %	2.349.230.168,0 0
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa pelayanan umum kanto (Orang)	makassar	5%	1.501.620.000,0 0		45 Orang	1.581.629.000,0 0

XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Tahun) (Tahun)	makassar	5%	767.601.168,00		1 Tahun	767.601.168,00
X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	makassar	5%	1.947.106.800,00		100 %	2.012.116.800,00
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	makassar	5%	400.760.000,00		13 Unit	450.760.000,00
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (Unit)	makassar	5%	150.390.000,00		7 Unit	180.390.000,00
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (Unit)	makassar	5%			6 Unit	

	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Aplikasi)	makassar	5%	95.000.000,00		9 Aplikasi	0,00
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (Unit)	makassar	5%	884.270.000,00		40 Unit	894.280.000,00
	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	makassar	5%	416.686.800,00		140 Unit	486.686.800,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2022, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel, RENJA PD Tahun 2022 ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022;
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel wajib menjadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja

program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022.

4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renja secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2022.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang dan Sekretariat lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.2 Penutup

Demikian Rencana Kinerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 2021
KEPALA BADAN,

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009